



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ESELON I PUSAT
004 02 890615**

**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2016**

Unaudited

Jalan Udayana Nomor 22 Mataram
Telp (0370) 6163333 Fax (0370) 6162999

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat per 31 Desember 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Singkatan	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	3
V. Catatan atas Laporan Keuangan	4
A. Penjelasan Umum	9
A. 1. Dasar Hukum	9
A. 2. Profil dan Kebijakan Teknis BPK RI Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat	11
A. 3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
A. 4. Basis Akuntansi	20
A. 5. Dasar Pengukuran	20
A. 6. Kebijakan Akuntansi	20
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
B. 1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	33
B. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38
C. 1. Penjelasan Umum Neraca	38
C. 2. Penjelasan Per Pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D. 1. Penjelasan Umum Laporan Operasional	41
D. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
E. 1. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	45
E. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
F. 1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	48
F. 2. Pengungkapan Lain-lain	48
F. 3. Rekening Pemerintah	48
F. 4. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan oleh KAP	48
VI. Lampiran A.1 serta Lampiran 1 – 34	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015	2
Tabel 3	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2016 dan 2015	3
Tabel 4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	3
Tabel 5	Penggolongan Kualitas Piutang	26
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset	29
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2016	33
Tabel 8	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2016	33
Tabel 9	Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2016	34
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2016 dan 2015	34
Tabel 11	Anggaran dan Realisasi Belanja Jenis Belanja TA 2016	35
Tabel 12	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program TA 2016	35
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2016 dan 2015	36
Tabel 14	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015	36
Tabel 15	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015	37
Tabel 16	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015	37
Tabel 17	Komposisi Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015	38
Tabel 18	Rincian Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015	39
Tabel 19	Rincian Perbandingan Persediaan pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan per 31 Desember 2016	40
Tabel 20	Komposisi Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2016 dan 2015	41
Tabel 21	Rincian Perbandingan Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015	42
Tabel 22	Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015	42
Tabel 23	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015	43
Tabel 24	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015	43
Tabel 25	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015	44
Tabel 26	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015	44
Tabel 27	Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	45
Tabel 28	Rincian Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	46
Tabel 29	Rincian Perbandingan Penyesuaian Nilai Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	47
Tabel 30	Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	47

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ANAO	:	<i>Australian National Audit Office</i>
AusAID	:	<i>Australian Agency For International Development</i>
BMN	:	Barang Milik Negara
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KUN	:	Kas Umum Negara
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKPP/LKKL	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LN	:	Luar Negeri
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran
MAK	:	Mata Anggaran Keluaran
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Pusdiklat	:	Pusat Pendidikan dan Latihan
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKAKL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RM	:	Rupiah Murni
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	: Satuan Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SS	: Sasaran Strategis
SSBP	: Surat Setoran Pendapatan Bukan Pajak
SSPB	: Surat Setoran Pengembalian Belanja
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UM	: Uang Muka
UP	: Uang Persediaan
USAID	: <i>United State Agency International Development</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 *Unaudited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp8.553.347.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,0% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara TA 2016 adalah sebesar Rp7.228.697.839,00 atau mencapai 84,51% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
TA 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)

	TA 2016			TA 2015
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0,00	0,00	-	-
JUMLAH PENDAPATAN & HIBAH	0,00	0,00	-	-
Belanja Transaksi Kas				
Belanja Rupiah Murni	8.553.347.000,00	7.228.697.839,00	84,51	6.853.189.820
Belanja Pinjaman dan Hibah	-	-	-	-
Belanja Transaksi Non Kas				
Belanja Barang Non Kas	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	8.553.347.000,00	7.228.697.839,00	84,51	6.853.189.820

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Akun	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Nilai Kenaikan (Penurunan)	%
Aset				
Aset Lancar	0	0	0	0
Aset Tetap	0	0	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	0	0	0	0
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
Jumlah kewajiban	0	0	0	0
Ekuitas				
Ekuitas	0	0	0	0
Jumlah Ekuitas	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0	0	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.225.663.687,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.225.663.687,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp3.034.152,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.228.697.839,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan

31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
 Ringkasan Laporan Operasional
 Tahun 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	7.225.663.687,00	6.853.443.890,00	372.219.797,00	5,43
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7.225.663.687,00)	(6.853.443.890,00)	(372.219.797,00)	5,43
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.034.152,00)	0,00	(3.034.152,00)	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.034.152,00)	0,00	(3.034.152,00)	0,00
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.228.697.839,00)	(6.853.443.890,00)	(375.253.949,00)	5,48

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.228.697.839,00 kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp0,00 dan ditambah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas senilai Rp0,00 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.228.697.839,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp0,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4
 Ringkasan Perubahan Ekuitas
 Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
 (Dalam Rupiah)

	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	0	0	0	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.228.697.839)	(6.853.443.890)	(375.253.949)	5,48
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	0	254.070	(254.070)	(100,00)
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0,00
Lain-lain	0	0	0	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7.228.697.839	6.853.189.820	375.508.019	5,48
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0,00
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	0	0	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0,00	0
BELANJA	B.2.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.2.2.2	8.553.347.000	7.228.697.839	84,51	6.853.189.820
Jumlah Belanja Operasi		8.553.347.000	7.228.697.839	84,51	6.853.189.820
Belanja Modal	B.2.2.3				
Belanja Tanah	B.2.2.3.1	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.3.2	0	0	0,00	0
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.3.3	0	0	0,00	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.2.3.4	0	0	0,00	0
Belanja Modal lainnya	B.2.2.3.5	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi		0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		8.553.347.000	7.228.697.839	84,51	6.853.189.820

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini – Halaman 5*

NERACA

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
ASET			
ASET LANCAR	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.2.1.3	0	0
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.2.1.4	0	0
Piutang PNPB	C.2.1.5	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.2.1.8	0	0
Persediaan	C.2.1.9	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
ASET TETAP	C.2.2		
Tanah	C.2.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.3		
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.3.2	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.3	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET LAINNYA	C.2.4		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	0	0
Aset Lain-Lain	C.2.4.2	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.2	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	0	0
JUMLAH EKUITAS		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	0

LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.2.1	0	0
Beban Persediaan	D.2.2.2	110.040.880	71.732.769
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	1.152.908.303	875.878.918
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	5.962.714.504	5.905.832.203
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	0	0
Beban Lain-lain	D.2.2.8	0	0
JUMLAH BEBAN		7.225.663.687	6.853.443.890
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.225.663.687)	(6.853.443.890)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.3	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.034.152)	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.034.152)	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7.228.697.839)	(6.853.443.890)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.2.4	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(7.228.697.839)	(6.853.443.890)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
EKUITAS AWAL	E.2.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(7.228.697.839)	(6.853.443.890)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.2.4	0	254.070
Penyesuaian Nilai Aset	E.2.4.1	0	254.070
Koreksi Nilai Persediaan	E.2.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.2.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.2.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.5	7.228.697.839	6.853.189.820
EKUITAS AKHIR		0	0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak

- Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat .
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 26. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-157/PB/2015 tentang Pemutahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkedudukan di Kota Mataram.

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjeraan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan

baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah tiga kali dengan perubahan pertama SK BPK No.1/K/I-XIII.2/2/2016; perubahan kedua SK BPK No.10/K/I-XIII.2/11/2016 dan perubahan ke tiga SK BPK No.13/K/I-XIII.2/12/2016.

3. Pegawai BPK

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Status Pegawai BPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pola rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Renstra 2016—2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

4. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a) Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b) Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah yang diperiksa (*auditee*);
- c) Instansi penegak hukum;
- d) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e) Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f) Warga Negara Indonesia.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT

Rencana Strategis BPK Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah satuan kerja vertikal BPK, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat menginduk Renstra Lembaga BPK.

Renstra BPK Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

- secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas; bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. Independensi; bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi.
- c. Profesionalisme; dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada struktur yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

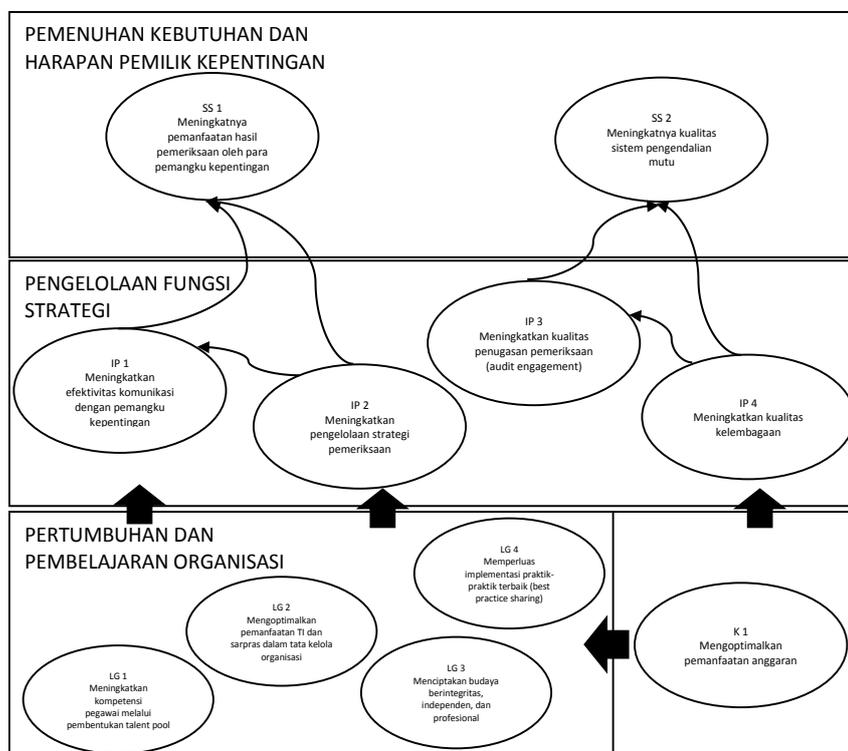
5. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS₁);
- b. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS₂).

Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasi proses-proses internal atau *Internal Process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *Learning and Growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

PETA STRATEGIS



6. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).
 IKU Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat sebagai berikut:

	Sasaran Strategis		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%
		1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6
		1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%
		2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
SS 3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
		3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
SS 4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
		5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%
		5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%
		5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%
		5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
		5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%
SS 6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	60%
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	50%
SS 7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	0%

Matrik hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Nama IKU	
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara	SS 1 Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
		Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	
	IP 1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan	Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan	Pendapat BPK yang Diterbitkan
			Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
			Presentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan
	Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara	SS 2 Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
			Presentase Pemeriksaan Kinerja
			Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
Presentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah			
Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK			
Indeks Mutu Organisasi			
IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (audit engagement)	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	
IP 4 Meningkatkan kualitas kelembagaan	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Utama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	
		Tingkat Evaluasi atas LHP	
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	
LG 1 Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool	Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	
		Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	
		Presentase Pemenuhan <i>Talent Pool</i>	
LG 2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	Mempertluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice)	Indeks Kepuasan Pegawai	
		Presentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	
		Presentase Pemanfaatan TI	
LG 3 Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	Mempertluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice)	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	
		Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	
		Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK	
K1 Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	Mempertluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice)	Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai	
		Penyusunan <i>Best Practice</i> Penyebaran <i>Best Practice</i>	
		Tingkat Kinerja Anggaran	

7. Lingkungan Strategis BPK

Lingkungan strategis BPK meliputi nasional dan lingkungan strategis internasional. Lingkungan strategis nasional meliputi antara lain tantangan bangsa Indonesia dan agenda pembangunan serta harapan pemangku kepentingan. Lingkungan strategis internasional yaitu aktif di dalam kegiatan organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions

(INTOSAI), pada tingkat Asia atau The Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) dan pada tingkat ASEAN atau ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI).

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK

Program dan Kegiatan BPK

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, RKP disusun berdasarkan RPJM. Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL. Renstra KL tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan KL dan bersifat indikatif. Renstra KL tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJP dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK.

BPK telah berhasil menyusun Program dan Kegiatan BPK yang telah digunakan dalam Renja BPK Tahun 2016 dan penganggaran (RKAKL/DIPA) Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI
1036	Pengawasan oleh Inspektorat
PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))	
06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah. Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksa Keuangan Negara
1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan. Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara
1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Selanjutnya dari program-program tersebut dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan dengan pembagian Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

1. Satuan Kerja di Kantor Pusat

PROGRAM GENERIK DI KANTOR PUSAT (DIPA SETJEN)		
UNIT ESELON I / UNIT ESELON II	KODE	PROGRAM/KEGIATAN
Sekretariat Jenderal	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK
1 Biro Sekretariat Pimpinan	1032	Pelayanan Kesekretariatan, kehumasan dan kerjasama
2 Biro Humas dan Kerja Sama Internasional		
3 Biro Sumber Daya Manusia	1033	
4 Biro Keuangan	1034	
Sekretariat Jenderal	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI
1 Biro Teknologi Informasi	1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
2 Biro Umum		
Inspektorat Utama	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI
1 Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	1036	Pengawasan oleh Inspektorat
2 Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan		
3 Inspektorat Penegak Integritas		

PROGRAM TEKNIS DI KANTOR PUSAT (DIPA BPK PUSAT)

UNIT ESELON I/ UNIT ESELON II		KODE	PROGRAM/KEGIATAN
Ditama Binbangkum		06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
1	Direktorat KHKN/D	1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah
2	Direktorat LPBH	1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum
Ditama Revbang		07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara
1	Direktorat PSMK	1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
2	Direktorat EPP	1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan
3	Direktorat Litbang	1041	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
AKN I s.d. VII		08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara
1	Auditorat	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara

2. Satuan Kerja di Pusdiklat/Perwakilan

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PUSDIKLAT

Kode	PROGRAM/KEGIATAN DI PUSDIKLAT
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PERWAKILAN

Kode	PROGRAM/KEGIATAN DI PERWAKILAN
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))	
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat Tahun 2016 *Unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A. 4. BASIS AKUNTANSI

*Basis
Akuntansi*

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 5. DASAR PENGUKURAN

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA **1. Pendapatan- LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

*Pendapatan-
LO*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

<i>Belanja</i>	<p>3. Belanja</p> <p>Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>
<i>Beban</i>	<p>4. Beban</p> <p>Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>
<i>Aset</i>	<p>5. Aset</p> <p>Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.</p> <p>Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.</p> <p>Pada setiap akhir periode tahun anggaran, seluruh Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada satuan kerja Eselon I BPK Pusat telah ditransfer keluar ke satuan kerja Eselon I Setjen.</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <p>Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai pada tanggal Neraca.
Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan disisi Kewajiban

Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

- Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)
Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar dimuka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBK dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBK yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya. Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:
 - 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
 - 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
 - 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
 - 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

Nilai Persediaan pada satker Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat tetap disajikan jika terdapat anggaran Belanja Persediaan dan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) serta tempat yang mengelola Persediaan. Jika tidak terdapat UAPKPB dan tempat pengelola Persediaan, tetapi memiliki anggaran, maka dilakukan transfer ke satker Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Setjen.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp 300.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK);

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun 2016 menjadi beban amortisasi Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2016 dilakukan dengan mengkoreksi nilai Ekuitas tahun sebelumnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun
- Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- *Franchise* masa manfaat 5 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
- Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
- Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
- Merek masa manfaat 10 tahun.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

○ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk

- menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.
- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
 - Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
 - Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0,00
	a. Penerimaan Pajak	0	0	0,00
	b. PNBPN	0	0	0,00
	c. Hibah	0	0	0,00
2	Realisasi Belanja Negara	8.553.347.000	7.228.697.839	84,51
	- Belanja Rupiah Murni	8.553.347.000	7.228.697.839	84,51
	- Belanja Pinjaman LN			
	-Belanja Rupiah Pendamping			
	-Belanja Hibah LN			
	-Belanja Barang Non Kas			

Selama periode TA 2016, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja TA 2016 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	0	0
	a. Penerimaan Pajak	0	0
	b. PNBPN	0	0
	c. Hibah	0	0
2	Realisasi Belanja Negara	8.553.347.000	8.553.347.000
	- Belanja Rupiah Murni	8.553.347.000	8.553.347.000
	- Belanja Pinjaman LN		
	-Belanja Rupiah Pendamping		
	-Belanja Hibah LN		
	-Belanja Barang Non Kas		

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp0,00 juta
Pendapatan Rp0,00 juta
 Realisasi Pendapatan pada TA 2016 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2016

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (42311)	0	0	0,00
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)	0	0	0,00
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	0	0	0,00
4	Pendapatan Jasa II (42322)	0	0	0,00
5	Pendapatan Denda (42375)	0	0	0,00
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	0	0	0,00
7	Pendapatan Pelunasan Piutang (42392)	0	0	0,00
Jumlah		0	0	0,00

Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2016 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan TA 2015 sebesar Rp0,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah
TA 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2016	TA 2015	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (42311)	0	0	0	0,00%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)	0	0	0	0,00%
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	0	0	0	0,00%
4	Pendapatan Jasa II (42322)	0	0	0	0,00%
5	Pendapatan Denda (42375)	0	0	0	0,00%
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	0	0	0	0,00%
Jumlah		0	0	0	0,00%

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4,5)

B.2.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2016 adalah sebesar Rp7.228.697.839,00 atau 84,51% dari anggaran belanja sebesar Rp8.553.347.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:
Rp7.228,69 juta

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
TA 2016

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2016		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0,00
52	Belanja Barang	8.553.347.000	7.577.734.199	88,59
53	Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Kotor		8.553.347.000	7.577.734.199	88,59
Pengembalian Belanja		0	349.036.360	
Jumlah		8.553.347.000	7.228.697.839	84,51

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program
TA 2016

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Dukungan Manajemen dan	0	0	0,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	0	0	0,00
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	8.553.347.000	7.228.697.839	84,51
Jumlah		8.553.347.000	7.228.697.839	84,51

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,48% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
TA 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2016	TA 2015	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
52	Belanja Barang	7.228.697.839	6.853.189.820	375.508.019	5,48
53	Belanja Modal	0	0	0	0,00
Jumlah		7.228.697.839	6.853.189.820	375.508.019	5,48

Kenaikan realisasi belanja TA 2016 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2015 antar lain disebabkan:

1. Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena pada dasarnya standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tidak terdapat anggaran/realisasi Belanja Pegawai pada TA 2016 dan TA 2015.
Rp0,00 juta Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2016	TA 2015	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	0	0	0	0,00
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	0	0	0	0,00
5121	Belanja Honorarium	0	0	0	0,00
5122	Belanja Lembur	0	0	0	0,00
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto		0	0	0	0,00
Pengembalian Belanja		0	0	0	0,00
Jumlah Netto		0	0	0	0,00

B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp8.553.347.000,00 dan realisasi Belanja Barang TA 2016 sebesar Rp7.228.697.839,00 atau 84,51% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.
Rp7.228,69 juta Realisasi belanja barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar Rp7.228.697.839,00 dan Rp6.853.189.820,00.
Realisasi belanja sampai dengan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,48% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Adanya inflasi serta kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2016	TA 2015	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.090.976.626	807.567.165	283.409.461	35,09
5212	Belanja Barang Non Operasional	61.931.677	93.384.452	(31.452.775)	(33,68)
5218	Belanja Barang Persediaan	113.075.032	46.406.000	66.669.032	143,66
5221	Belanja Jasa	0	0	0	0,00
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.311.750.864	6.183.022.396	128.728.468	2,08
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto		7.577.734.199	7.130.380.013	447.354.186	6,27
Pengembalian Belanja		349.036.360	277.190.193	71.846.167	25,92
Jumlah Netto		7.228.697.839	6.853.189.820	375.508.019	5,48

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Tidak terdapat anggaran/realisasi Belanja Modal pada TA 2016 dan TA 2015.
Rp0,00 juta

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2016	TA 2015	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto		0	0	0	0,00
Pengembalian Belanja		0	0	0	0,00
Jumlah Netto		0	0	0	0,00

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
Aset	0	0	0,00
Kewajiban	0	0	0,00
Ekuitas	0	0	0,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Aset Lancar Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015.

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 juta Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Uang di rekening Bank BNI No.acc 0369530256	0	0
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp0,00 telah disetorkan sampai dengan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2015

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	30 Desember 2015	1F7595INVRBOVFF9	BNI	303.766.865
2	30 Desember 2015	FC9AE5IRFA9TJMF9	BNI	46.085
Jumlah				303.812.950

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp0,00 dengan rincian peyetoran nihil uang persediaan sebagai berikut:

Penyetoran Saldo nihil uang persediaan per 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	13 Desember 2016	2DCA460AC4D6EAMP	BNI	14.375
				-
Jumlah				14.375

Penyetoran Saldo uang persediaan setelah tanggal 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
				-
				-
Jumlah				-

C.2.1.2. Persediaan

Persediaan Tidak terdapat saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.
Rp0,00 juta

Rincian Persediaan 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Bahan untuk pemeliharaan	0	0
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0	0
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
6	Bahan Baku	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0
8	Persediaan Lainnya	0	0
TOTAL		0	0

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan
Per 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	SAIBA	Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
6	Bahan Baku	0	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0	0
8	Persediaan Lainnya	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat dalam kondisi baik.

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap Rp0,00 juta Tidak terdapat nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015

C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015

C.2.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp0,00 juta Tidak terdapat nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015.

C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015

C.2.6. EKUITAS

Ekuitas Rp0,00 juta Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	2016	2015	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(7.225.663.687)	(6.853.443.890)	5,43
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.034.152)	0	0,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0	0	0,00
Surplus/Defisit LO	(7.228.697.839)	(6.853.443.890)	5,48

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.225.663.687,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dan Beban Operasional sebesar Rp7.225.663.687,00.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp3.034.152,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non lancar sebesar Rp0,00, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.034.152,00.

Surplus dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Pendapatan Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015.

D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp0,00 juta Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.225.663.687,00 dan Rp6.853.443.890,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Perbandingan Beban Operasional
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2016	2015	%
1	Beban Pegawai	-	-	0,00
2	Beban Persediaan	110.040.880,00	71.732.769,00	53,40
3	Beban Barang dan Jasa	1.152.908.303,00	875.878.918,00	31,63
4	Beban Pemeliharaan	-	-	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas	5.962.714.504,00	5.905.832.203,00	0,96
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	0,00
8	Beban Lain-lain	-	-	0,00
	Jumlah Beban Operasional	7.225.663.687,00	6.853.443.890,00	5,43

D.2.2.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp110,04 juta Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp110.040.880,00 dan Rp71.732.769,00, terjadi kenaikan sebesar Rp38.308.111,00 atau 53,40%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Beban Persediaan
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2016	2015	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	110.040.880	71.732.769	53,40
2	Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0,00
3	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
	Jumlah	110.040.880,00	71.732.769,00	53,40

D.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp1.152,90 juta Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.152.908.303,00 dan Rp875.878.918,00, terjadi kenaikan sebesar Rp277.029.385,00 atau 31,62%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2016	2015	%
Beban Barang				
1	Beban Barang Operasional	1.090.976.626,00	790.597.366,00	37,99
2	Beban Barang Non Operasional	61.931.677,00	85.281.552,00	(27,38)
3	Beban Kontribusi	0	0	0,00
Beban Jasa				
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0,00
2	Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0,00
3	Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
4	Beban Jasa Profesi	0	0	0,00
5	Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya				
1	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
3	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah		1.152.908.303,00	875.878.918,00	31,63

D.2.2.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp5.962,71 juta Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.962.714.504,00 dan Rp5.905.832.203,00, terjadi kenaikan sebesar Rp56.882.301,00 atau 0,96%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2016	2015	%
1	Beban Perjalanan Biasa	5.455.691.904	5.700.502.203	(4,29)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.975.000	7.200.000	385,76
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	472.047.600	198.130.000	138,25
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Jumlah		5.962.714.504,00	5.905.832.203,00	0,96

D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp3,03 juta Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.034.152,00 dan Rp0,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 25
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	2016	2015	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	329.288	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.363.440	0	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(3.034.152)	0	0,00

D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp3,03 juta

Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.034.152,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.034.152,00 atau 0,0%. Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2015	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
a	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
b	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
d	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
e	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0,00
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0,00
g	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	329.288	0	0,00
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	329.288	0	0,00
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
a	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
b	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.363.440	0	0,00
	Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.363.440	0	0,00
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.034.152)	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
Ekuitas Awal	0	0	0,00
Surplus/Defisit LO	(7.228.697.839)	(6.853.443.890)	5,48
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0	0	0,00
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	254.070	(100,00)
Transaksi Antara Entitas	7.228.697.839	6.853.189.820	5,48
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	0	0	0,00
Ekuitas Akhir	0	0	0,00

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp0,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.228.697.839,00.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.228.697.839,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp0,00 juta Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016

Rp7.228,69 juta dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.228.697.839,00 dan Rp6.853.443.890,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00 juta Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp254.070,00.

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 28
Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Penyesuaian Nilai Aset	0	254.070	(100,00)
2	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0,00
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0,00
4	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0,00
5	Lain-lain	0	0	0,00
	Jumlah	0	254.070	(100,00)

E.2.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 juta Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp254.070,00, terjadi penurunan sebesar Rp254.070,00 atau 100,00%. Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian nilai aset yang terjadi pada periode berjalan untuk nilai aset tahun lalu. Pada tahun 2015 Penyesuaian nilai Aset untuk Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan Nilai penyesuaian nilai pembelian persediaan. Pada tahun 2016 untuk seluruh penyesuaian nilai persediaan terdapat pada Laporan Operasional pada Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Rincian Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Perbandingan Penyesuaian Nilai Persediaan
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
2	Penyesuaian Nilai Aset	0	254.070	(100,00)
	Jumlah	0	254.070	(100,00)

E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp7.228,69 juta

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.228.697.839,00 dan Rp6.853.189.820,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

dalam rupiah

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Diterima Dari Entitas Lain	0	0	0,00
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.228.697.839	6.853.189.820	5,48
3	Transfer Masuk	0	0	0,00
4	Transfer Keluar	0	0	0,00
5	Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0,00
6	Pengesahan Pembelaian Hibah	0	0	0,00
	Jumlah	7.228.697.839	6.853.189.820	5,48

E.2.5. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp0,00 juta

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat (kode satker 890615) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0369530256 atas nama BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Mataram.

F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2015	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tanah							
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	-	-	-	-	-	-
5	Komputer Unit	4	-	-	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	-	-
7	Peralatan Olah Raga	3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
D	Jaringan							
1	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya							
1	Barang bercorak kesenian	4	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-

**BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2015	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
G	Aset Lainnya							
1	Aset Tak Berwujud*	4	-	-	-	-	-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya		-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
	Total		-	-	-	-	-	-

* Beban Amortisasi

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Setjen
Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2016

No	Aset Tetap/Uraian Koreksi	Akumulasi Penyusutan
		Per 31-12-2016
A	Peralatan dan Mesin	
	Koreksi Saldo Awal	-
	Koreksi Nilai Pembelian	-
	Transfer Masuk	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Penghapusan	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Penghentiaan Aset Dari	-
	Penggunaan	-
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
	Jumlah	-
B	Gedung dan Bangunan	
	Koreksi Pembelian	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Jumlah	-
C	Jalan dan Jembatan	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Jumlah	-
D	Irigasi	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-
E	Jaringan	
	Pembelian	-
	Transfer Keluar	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Jumlah	-
F	Aset Tetap Lainnya	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Setjen
Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2016

No	Aset Tetap/Uraian Koreksi	Akumulasi Penyusutan
		Per 31-12-2016
G	Software	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
Jumlah		-
H	Lisensi	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
Jumlah		-
I	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Jumlah		-
Total*		-

*) Nilai Total harus sama dengan Nilai Total pada Kolom 7 lampiran A.1

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran-Lampiran Pendukung Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2016

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran:
a. Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir 31 Desember 2016
b. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2016
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2016
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2016
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2016
- Lampiran 6 Neraca Tingkat Satuan Kerja:
a. Neraca per 31 Desember 2016
b. Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015
- Lampiran 7 Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2016 (*Basis Kas dan Akrua*)
- Lampiran 8 Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015
- Lampiran 9 Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

B. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

- Lampiran 10 Catatan Ringkas Barang Milik Negara Satker Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 11 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2016
- Lampiran 12 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Intrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 13 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 14 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 15 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Barang Bersejarah Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 16 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Aset Tak Berwujud Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 17 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Konstruksi Dalam

- Pengerjaan Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 18 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Intrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 19 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 20 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 21 Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Aset Tak Berwujud Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 22 Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Proses Penghapusan Kepada Pengelola Barang Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 23 Laporan Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang Telah Diusulkan Proses Penghapusan Kepada Pengelola Barang Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 24 Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2016 (*hasil cetakan khusus BMN yang dalam kondisi rusak*)
- Lampiran 25 Berita Acara *Stock Opname* Persediaan per 31 Desember 2016
- Lampiran 26 Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2016:
a. Laporan Barang Persediaan dari aplikasi SIMAK BMN

C. Lampiran-Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung Catatan atas Laporan Keuangan

- Lampiran 27 Laporan Rekening Pemerintah
- Lampiran 28 Lampiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KAP
- Lampiran 29 Berita Acara Rekonsiliasi:
a. Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 (*tanpa lampiran*).
b. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) per 31 Desember 2016.
c. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) per 31 Desember 2016.
- Lampiran 30 Daftar SSBP untuk Penyetoran Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2015 yang disetor Tahun 2016 beserta fotokopi dokumen SSBP dan Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2016.
- Lampiran 31 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per

31 Desember 2016

- Lampiran 32 Daftar Aset yang Berasal dari Belanja Barang Tahun 2016
- Lampiran 33 Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi Tahun 2016
- Lampiran 34 Lampiran Pendukung CaLK yaitu:
- a. Kertas Kerja Perhitungan Belanja Barang Dibayar di Muka (*Prepaid*)
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak
 - c. Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - d. Daftar Penyetoran Piutang Lainnya per 31 Desember 2016
 - e. Kertas Kerja Analisa Belanja Modal
 - f. Kertas Kerja Persediaan
 - g. Status Tanah
 - h. Lampiran Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu:
 - Daftar Pembayaran atas saldo Belanja Pegawai/Barang yang Masih Harus di bayar 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2016 (Beserta No. SPM/SP2D)
 - Rekapitulasi Perhitungan Kekurangan Pembayaran Gaji, Uang Makan Pegawai per 31 Desember 2016
 - Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Tagihan Langganan Daya dan Jasa per 31 Desember 2016
 - i. Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Sewa Diterima Di Muka



LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap. : LRASS
Tanggal : 23-02-17
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastk

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Mataram, 13 Februari 2017

Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono

NIP. 197006011991031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 23 Februari 2017
Halaman : 1
Prog.id : lu_pastkt

No	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51	7,775,770,000	6,853,189,820	(922,580,180)	88.14
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51	7,775,770,000	6,853,189,820	(922,580,180)	88.14
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	8,553,347,000	7,228,697,839	(1,324,649,161)	84.51	7,775,770,000	6,853,189,820	(922,580,180)	88.14
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
 Tanggal : 23 Februari 2017
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Mataram, 13 Februari 2017

Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono

NIP. 197006011991031002



LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 23 Februari 2017
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara								
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara								
085	Rumusan bahan pendapat								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	2,900,000	2,900,000	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000	44.76	1,602,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,900,000	2,900,000	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000	44.76	1,602,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,913,000	4,913,000	4,815,700	4,815,700	0	4,815,700	98.02	97,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,913,000	4,913,000	4,815,700	4,815,700	0	4,815,700	98.02	97,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,813,000	7,813,000	6,113,700	6,113,700	0	6,113,700	78.25	1,699,300
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.085	7,813,000	7,813,000	6,113,700	6,113,700	0	6,113,700	78.25	1,699,300
086	Layanan Administrasi Pemeriksaan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	27,840,000	38,280,000	30,316,677	30,316,677	0	30,316,677	79.20	7,963,323
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	28,500,000	28,500,000	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000	82.46	5,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	56,340,000	66,780,000	53,816,677	53,816,677	0	53,816,677	80.59	12,963,323

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
 TAHUN 2016
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 23 Februari 2017
 Halaman : 5
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	8,553,347,000	8,553,347,000	7,577,734,199	7,577,734,199	(349,036,360)	7,228,697,839	88.59	1,324,649,161
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	8,553,347,000	8,553,347,000	7,577,734,199	7,577,734,199	(349,036,360)	7,228,697,839	88.59	1,324,649,161
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	8,553,347,000	8,553,347,000	7,577,734,199	7,577,734,199	(349,036,360)	7,228,697,839	88.59	1,324,649,161



LAMPIRAN 3

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 23-02-17
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
01	RUPIAH MURNI							
0	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara							
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
086	Layanan Administrasi Pemeriksaan							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	514,000	514,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	514,000	514,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	514,000	514,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.086	0	0	0	514,000	514,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	0	514,000	514,000	0.00	0
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
118	LHP BPK RI Perwakilan Prov. NTB							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	70,038,552	171,694,400	241,732,952	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	70,038,552	171,694,400	241,732,952	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	70,038,552	171,694,400	241,732,952	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.118	0	0	70,038,552	171,694,400	241,732,952	0.00	0



LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2016

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK TAHUN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 23/02/17
 HAL : 1
 PROG. ID : : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	
			----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				



LAMPIRAN 5

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

NEGARA DAN HIBAH SATKER

PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK TAHUN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
 TANGGAL : 23/02/17
 HAL : 1
 PROG. ID : : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7
			----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----			



LAMPIRAN 6

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKT
Tanggal : 23/02/17
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono
NIP. 197006011991031002



LAMPIRAN 7
NERACA PERCOBAAN
PER 31 DESEMBER 2016

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 23-02-17
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	1,324,649,161	
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		1,392,951,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		56,714,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		28,500,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		124,189,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		48,000,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		6,219,498,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		35,700,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		647,795,000
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,090,976,626	
3	521211	Belanja Bahan	38,431,677	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	23,500,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	113,075,032	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	5,804,728,264	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		349,036,360
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,975,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	472,047,600	
		J U M L A H	8,902,383,360	8,902,383,360

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 23-02-17
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		7,228,697,839
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		329,288
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,090,976,626	
3	521211	Beban Bahan	38,431,677	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	23,500,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	5,804,728,264	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		349,036,360
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,975,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	472,047,600	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	110,040,880	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3,363,440	
		J U M L A H	7,578,063,487	7,578,063,487



LAMPIRAN 8
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	110,040,880	71,732,769	38,308,111	53.40
Beban Barang dan Jasa	1,152,908,303	875,878,918	277,029,385	31.62
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	5,962,714,504	5,905,832,203	56,882,301	0.96
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	7,225,663,687	6,853,443,890	372,219,797	85.99
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN	(7,225,663,687)	(6,853,443,890)	(372,219,797)	(85.99)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
UNIT ORGANISASI : 02 **B. P. K. PUSAT**
WILAYAH/PROPINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**
SATUAN KERJA : 890615 **BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB**

JENIS KEWENANGAN : KD **KANTOR DAERAH**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	329,288	0	329,288	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,363,440	0	3,363,440	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3,034,152)	0	(3,034,152)	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,034,152)	0	(3,034,152)	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0		0	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7,228,697,839)	(6,853,443,890)	(375,253,949)	(85.99)

Mataram, 13 Februari 2017
 Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono
 NIP. 197006011991031002



LAMPIRAN 9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,228,697,839)	(6,853,443,890)	(375,253,949)	5.47
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	0	254,070	(254,070)	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	254,070	(254,070)	(100.00)
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,228,697,839	6,853,189,820	375,508,019	5.47
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0.00
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0.00

Mataram, 13 Februari 2017

Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono

NIP. 197006011991031002



LAMPIRAN 10
CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA SATKER
TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG TAHUNAN
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

➤ Entitas Pelaporan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

➤ Periode Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2016

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

➤ Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; dan
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.6/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

➤ Penyusutan

1) Nilai Penyusutan

a) Aset Tetap

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 dibagi menjadi dua yaitu:

- 1)) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012;
- 2)) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal ini perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.6/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.6/2013 dijelaskan bahwa penghitungan dan pencatatan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka:

- 1)) Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester I Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;
- 2)) Pencatatan Penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap dihapuskan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b) Aset Tak Berwujud

Nilai yang dapat diamortisasi atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 dibagi menjadi dua yaitu:

- 1)) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015;

- 2)) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- 2) Metode Penyusutan Yang Digunakan
Penyusutan atas seluruh BMN berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang menjadi objek penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 dan 251/PMK.06/2015 dilakukan dengan Metode Garis Lurus.
- 3) Masa Manfaat Yang Digunakan
Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sedangkan masa manfaat atas BMN berupa Aset Tak Berwujud ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan
Penyajian Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut :

Barang Persediaan		Rp	-
Tanah		Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	-	
Gedung dan Bangunan	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-	
Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Renovasi	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan ATL & ATR	Rp	-	
Nilai Buku Aset		Rp	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp	-
Total Aset Tetap		Rp	-
Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	-	
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	-	
Software Komputer	Rp	-	
Akumulasi Amortisasi Software Komputer	Rp	-	
Lisensi	Rp	-	
Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp	-	
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp	-	
Total Aset Lainnya		Rp	-
Total Aset		Rp	-

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2016 ini adalah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN
15. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) eksternal (*untuk LBMN yang diserahkan ke tingkat Wilayah (UAPPB-W) dan tingkat Eselon I (UAPPB-EI)*); dan
16. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER Tahun Anggaran 2016

1. Saldo awal Tahun Anggaran 2016

Nilai BMN per 01 Januari 2016 menurut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2016

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
117131	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (nol rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah/nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0.m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah 0 m² /Rp0,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	-	0,00

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Besar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Angkutan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0

Rusak Berat	0
-------------	---

Bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Laboratorium sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Persenjataan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Komputer sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Eksplorasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12) Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pengeboran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pengeboran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

16) Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Peraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Peraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Peraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

18) Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00. (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Rambu-Rambu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

19) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Olah Raga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Gedung sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Monumen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	-
Rusak Ringan	-
Rusak Berat	-

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Monumen sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Bangunan Menara (4.03)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Menara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Menara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Menara sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Jalan dan Jembatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Air di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Air di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Bangunan Air sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol

rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Instalasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Jaringan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

3. Hewan (6.03)

Saldo Hewan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Hewan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Hewan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Hewan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Hewan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

4. Ikan (6.04)

Saldo Ikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Ikan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Ikan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Ikan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Ikan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

5. Tanaman (6.05)

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

6. Barang Koleksi Non Budaya (6.06)

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar

Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

7. Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

1. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/unit/m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00.

Akumulasi Amortiasi Aset Tak Berwujud pada bidang barang Software Komputer dan Lisensi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4. Jalan, Jembatan, Irigasi	0,00	0,00
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi Penyusutan (BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah)
132111 Peralatan dan Mesin	Rp0,00
133111 Gedung dan Bangunan	Rp0,00
134112 Irigasi	Rp0,00
134113 Jaringan	Rp0,00
135121 Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
TOTAL	Rp0,00

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

3. Barang Milik Negara Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Per 31 Desember 2016

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total (Sub Jumlah 1+2+3)	0		0		0	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0	0
	Total (Sub Jumlah I+II)	0		0		0	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 per akun neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	0,00	0,00	0,00
2.	Tanah	0,00	0,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
6.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.	KDP	0,00	0,00	0,00
8.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Lain-lain*)	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1.	Tahunan Tahun 2012	0,00		
2.	Tahunan Tahun 2013	0,00	0,00	-
3.	Tahunan Tahun 2014	0,00	0,00	-
4.	Tahunan Tahun 2015	0,00	0,00	-
5.	Tahunan Tahun 2016	0,00	0,00	-

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan Barang

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4.	Jalan	0,00	0,00
5.	Irigasi	0,00	0,00
6.	Jaringan	0,00	0,00
7.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pengha-pusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3.	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4.	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6.	Telah diterbitkan	0	0	0	0	0

	Keputusan dari Pengguna Barang					
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8.	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

Keterangan : *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI.

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> Oleh Pengelola	0
3	Peberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2016 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		-	-	-

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2016 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		0,00	-	-

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum (BLU) dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Satker BLU	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		-	-	-

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016, adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi Terkait Bmn Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa

Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Total		-	-

9. BMN Berupa Barang Permerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00.

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak Ada

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak Ada

Penanggungjawab Laporan barang
Kuasa pengguna Barang Tahun
Anggaran 2016
Kuasa Pengguna Barang



Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak. 
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 11

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PER 31 DESEMBER 2016

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615.000 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
	TIDAK ADA DATA	0
J U M L A H		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 12

LAPORAN BARANGKUASA PENGGUNATAHUNAN- INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 13
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN –
EKSTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSESKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 14

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN –
GABUNGAN *INTRAKOMPTABEL* DAN *EKSTRAKOMPTABEL*
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 15

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN –
BARANG BERSEJARAH TAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016

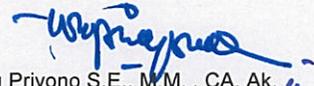
Tanggal : 10-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016 KUANTITAS	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2016 KUANTITAS
KODE	URAIAN			BERTAMBAH KUANTITAS	BERKURANG KUANTITAS	
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 16
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN—
ASET TAK BERWUJUD TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSTSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 17
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN–
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSKSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2016	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	
....	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA. Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 18

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN– INTRAKOMPTABELTAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2016						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	0
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 19

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
TAHUNAN– EKSTRAKOMPTABELTAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2016						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	0
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 20

LAPORAN PENYUSUTAN

BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN-

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL

TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2016						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	0
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 21

LAPORAN AMORTISASI

BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN-

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

TAHUN ANGGARAN 2016



LAMPIRAN 22

**LAPORAN BARANG HILANG YANG TELAH DIUSULKAN
PROSES PENGHAPUSAN KEPADA PENGELOLA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN BARANG HILANGTAHUNAN
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHISSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 23

**LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT YANG
TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSAN
KEPADA PENGELOLA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 10-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Mataram, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Perwakilan


 Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
 NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 24
LAPORAN KONDISI BARANG
PER 31 DESEMBER 2016

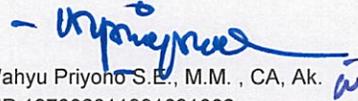
LAPORAN KONDISI BARANG
Per Sabtu, 31 Desember 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
B. P. K. PUSAT
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000

Tanggal : 10-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X . XX . XX . XX .	-----	0	-	0	0	0	0
<i>Jumlah -----</i>					0	0	0	0

Mataram, Sabtu, 31 Desember 2016
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 25
BERITA ACARA STOCK OPNAME PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2016

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
NOMOR : 02b/BAP/Persediaan/XIX.MTR.1.4/12/2016

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 (31-12-2016), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : A.A. Ayu Sinta Jayanti
NIP : 199009162015022004
Unit Kerja : Subbagian Umum dan TI
- II. Nama : Adhitya Megananda
NIP : 198702152011051001
Unit Kerja : Subbagian Umum dan TI

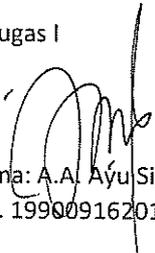
Telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan di lingkungan satuan kerja **BPK RI Pusat** c.q. Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (004.01.2300.890614) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (hasil pemeriksaan fisik terlampir)

Hasil pemeriksaan fisik akan digunakan sebagai dasar /bahan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja **BPK RI Pusat** dan tingkat Eselon I serta Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas Pemeriksa Fisik,

Petugas I


Nama: A.A. Ayu Sinta Jayanti
NIP. 199009162015022004

Petugas II


Nama : Adhitya Megananda
NIP. 198702152011051001

Mengetahui,

Kepala Subbagian Umum dan TI


Nama : Maula Rusindrawan
NIP. 197406131999031002

Lampiran Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan
Nomor : 02b/BAP/Persediaan/XIX.MTR.1.4/12/2016
Tanggal : 31 Desember 2016

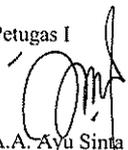
KODE	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5=3x4	6
	ALAT TULIS			0	
000001	- Balpoint gel	0	0	0	
000002	- Stabilo	0	0	0	
000003	- Balpoint Artline	0	0	0	
000004	- Label Ring	0	0	0	
000006	- Pensil	0	0	0	
000007	- Spidol Artline	0	0	0	
000008	- Clear File	0	0	0	
000009	- Pulpen Pilot	0	0	0	
000010	- Pulpen	0	0	0	
000011	- Stabilo	0	0	0	
000012	- Ballpoint Balliner	0	0	0	
000013	- Pulpen Snowman	0	0	0	
000014	- Ballpoint Hitam	0	0	0	
000015	- Spidol Permanen	0	0	0	
000016	- Spidol White Board	0	0	0	
000017	- Pulpen BPK	0	0	0	
000018	- Pensil Mekanik BPK	0	0	0	
000019	- Pensil Mekanik	0	0	0	
000020	- Ballpoint Meja	0	0	0	
000021	- Isi Pensil Mekanik	0	0	0	
	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL			0	
000001	- Tinta Stempel	0	0	0	
000002	- Stempel	0	0	0	
	PENJEPIT KERTAS			0	
000001	- Trigonal Clip No. 3	0	0	0	
000002	- Binder Clip No. 107	0	0	0	
000003	- Binder Clip No. 105	0	0	0	
000004	- Binder Clip 200 Joyco	0	0	0	
000005	- Binder Clip 155	0	0	0	
000006	- Binder Clip 260	0	0	0	
000009	- Klip No. 1	0	0	0	
000011	- Isi Stapler No. 10	0	0	0	
000012	- Binder Clip 111	0	0	0	
000013	- Stapler HDD 330	0	0	0	
000014	- Paper Clip	0	0	0	
	PENGHAPUS/KOREKTOR			0	
000001	- Penghapus White Board	0	0	0	
000002	- Tip Ex	0	0	0	
000003	- Penghapus Pensil	0	0	0	
	BUKU TULIS			0	
000001	- Buku Folio	0	0	0	
000003	- Note BPK	0	0	0	
000004	- Buku Kwarto	0	0	0	
	ORDNER DAN MAP			0	
000001	- Stopmap Folio	0	0	0	
000002	- Map Resleting A3	0	0	0	
000003	- Map Resleting A5	0	0	0	
000004	- Map Resleting A6	0	0	0	
000005	- Ordner	0	0	0	
000006	- Map Plastik	0	0	0	
000007	- Map Kancing	0	0	0	
000008	- Box File	0	0	0	
000009	- Map Batik	0	0	0	
000010	- Map Bisnis File	0	0	0	
	PENGGARIS			0	
000002	- Penggaris BPK	0	0	0	
	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)			0	
000001	- Gunting	0	0	0	

KODE	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5=3x4	6
000002	- Cutter	0		0	
	ALAT PEREKAT			0	
000002	- Lakban	0	0	0	
000003	- Lem	0	0	0	
000004	- Stiker Label	0	0	0	
000005	- Lakban Bening	0	0	0	
000006	- Selotip	0	0	0	
000007	- Double Tape	0	0	0	
000008	- Lem Alteco	0	0	0	
000009	- Double Tape Kecil	0	0	0	
000010	- Selotip Kecil	0	0	0	
000011	- Lakban Cokelat	0	0	0	
	STAPLES			0	
000001	- Stapler No. 10	0	0	0	
	ISI STAPLES			0	
000001	- Isi Staples HD 330	0	0	0	
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA			0	
000001	- Post It Besar	0	0	0	
000002	- Post It Pembatas	0	0	0	
000003	- Name Card Holder	0	0	0	
000005	- Pen Holder	0	0	0	
000006	- Pembolong Kertas Besar	0	0	0	
000007	- Post It-Sign Here	0	0	0	
000008	- Post It 657	0	0	0	
000009	- Post It 654	0	0	0	
000010	- Pelubang Kertas	0	0	0	
000011	- Rautan Meja	0	0	0	
000012	- Tempat Pensil BPK	0	0	0	
000013	- Clipboard	0	0	0	
000014	- Pelubang Kertas Single	0	0	0	
000015	- Post It Kecil	0	0	0	
	BERBAGAI KERTAS			0	
000001	- Kertas A4	0	0	0	
000002	- Kertas Kado	0	0	0	
000003	- Kertas F4	0	0	0	
000004	- Kartu Ucapan	0	0	0	
000005	- Continuous Form 5 Ply	0	0	0	
000006	- Kertas Concorde Biru	0	0	0	
000007	- Kertas HVS Biru	0	0	0	
000008	- Kertas Concorde	0	0	0	
000009	- Kertas Folio	0	0	0	
	KERTAS COVER			0	
000001	- Pita	0	0	0	
	AMPLOP			0	
000001	- Amplop Putih	0	0	0	
000002	- Amplop Besar	0	0	0	
	COMPUTER FILE/TEMPAT DISKET			0	
000001	- Album Zip CD	0	0	0	
	TINTA/TONER PRINTER			0	
000001	- Cartridge 85 A Black	0	0	0	
000002	- Cartridge 53A	0	0	0	
000003	- Cartridge 05A Rekondisi	0	0	0	
000004	- Cartridge 35A	0	0	0	
000005	- Cartridge 950 XL Black	0	0	0	
000006	- HP Toner Cartridge CF 280A (80A Black)	0	0	0	
000007	- Toner Cartridge 131A Cyan	0	0	0	
000008	- Toner Cartridge 131A Magenta	0	0	0	
000009	- Toner Cartridge 131A Black	0	0	0	
000010	- Toner Cartridge 131A Yellow	0	0	0	
000011	- Toner Cartridge HP 951 XL Cyan	0	0	0	
000012	- Toner Cartridge HP 951 XL Magenta	0	0	0	
000013	- Toner Cartridge HP 951 XL Yellow	0	0	0	
000014	- Cartridge Epson LQ-310	0	0	0	
000015	- Toner HP CE410A (305 Black)	0	0	0	

KODE	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5=3x4	6
000016	- Toner HP CE410A (305A Cyan)	0	0	0	
000017	- Toner HP CE410A (305A Yellow)	0	0	0	
000018	- Toner HP CE410A (305A Magenta)	0	0	0	
000019	- Toner HP CB435A (35A Black)	0	0	0	
000020	- Toner HP CE285A (85A Black)	0	0	0	
000021	- Toner HP CE505A (05A Black)	0	0	0	
000022	- Toner HP Q7553A (53A Black)	0	0	0	
	USB/FLASH DISK			0	
000001	- Flash Disk 32 GB	0	0	0	
000002	- Flashdisk 8 GB	0	0	0	
000003	- Flashdisk 16 GB	0	0	0	
000004	- Flashdisk	0	0	0	
	KARTU MEMORI			0	
000001	- Micro SDHC	0	0	0	
000002	- Memory Card 32 GB	0	0	0	
	MOUSE			0	
000001	- Wireless Mouse	0	0	0	
	BATU BATERAI			0	
000001	- Baterai A2	0	0	0	
000002	- Baterai A3	0	0	0	
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA			0	
000001	- Gantungan Kunci	0	0	0	
000004	- Push Pin	0	0	0	
000005	- Isi Cutter	0	0	0	
000006	- Plastik Sampul	0	0	0	
000007	- Pembatas Dokumen 25	0	0	0	
000008	- Pembatas Dokumen 40	0	0	0	
	Jumlah			0	

Petugas Pemeriksa Fisik,

Petugas I


A.A. Ayu Sinta Jayanti
199009162015022004

Petugas I


Adhitya Megananda
198702152011051001

Mengetahui,
Kasubbag Umum dan TI
Perwakilan Provinsi NTB


Maula Rusindrawan
NIP 197406131999031002



LAMPIRAN 26
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2016

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016

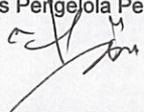
NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000.KD

Kode	Uraian	
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan


Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA, Ak.
NIP 197006011991031002

Mataram, 31 Desember 2016
Petugas Pergejola Persediaan


Novita Sari Fitria Wulandari
198811142015022001



LAMPIRAN 27
LAPORAN REKENING PEMERINTAH

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON
I PUSAT

LAPORAN REKENING PEMERINTAH
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ESELON I PUSAT

PER 31 DESEMBER 2016

LAPORAN REKENING PEMERINTAH
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ESELON I PUSAT

Laporan rekening pemerintah ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-94/PB/2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Tingkat Satuan Kerja. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui secara jelas dan transparan seluruh rekening yang dikuasai oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun daftar Rekening Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Badan Pemeriksa Keuangan (004)

SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT (01.890615)

Kategori Rekening : Rekening Bendahara Pengeluaran

**DAFTAR REKENING
YANG DIPERTAHANKAN**

Nomor Urut	IDENTITAS REKENING		NAMA BANK	KELOMPOK REKENING	KODE SATKER	Tujuan	Saldo per 31 Desember 2016		Persetujuan	
	Nomor Rekening	Nama Rekening				Pembukaan Rekening	US Dollar	Rupiah	Status	KPPN pemberi persetujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0369530256	BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	PT Bank Negara Indonesia	Rekening Pemerintah	890615	Untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran		0,00	Aktif	KPPN Mataram
Jumlah								0		

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 28

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN KAP
PER 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Badan Pemeriksa Keuangan (004)

SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT (01.890615)

Kategori Rekening : Rekening Bendahara Pengeluaran

**DAFTAR REKENING
YANG DIPERTAHANKAN**

Nomor Urut	IDENTITAS REKENING		NAMA BANK	KELOMPOK REKENING	KODE SATKER	Tujuan	Saldo per 31 Desember 2016		Persetujuan	
	Nomor Rekening	Nama Rekening				Pembukaan Rekening	US Dollar	Rupiah	Status	KPPN pemberi persetujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0369530256	BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	PT Bank Negara Indonesia	Rekening Pemerintah	890615	Untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran		0,00	Aktif	KPPN Mataram
Jumlah								0		

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 29
BERITA ACARA REKONSILIASI



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-202104/WPB.21/KP.038/2016

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MATARAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2016.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	8,553,347,000	8,553,347,000	0
2	Belanja	7,577,734,199	7,577,734,199	0
3	Pengembalian Belanja	-349,036,360	-349,036,360	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Darojat Imam Wijaya
NIP.197604021996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Kepala Perwakilan

Wahyu Priyono
NIP.197006011991031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (890615)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SAU : 8,553,347,000

SAI/SA-BUN : 8,553,347,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SAU : 7,577,734,199

SAI/SA-BUN : 7,577,734,199

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SAU : -349,036,360

SAI/SA-BUN : -349,036,360

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Kepala Perwakilan

Darojat Imam Wijaya
NIP.197604021996021001



Wahyu Priyono
NIP.197006011991031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Udayana No.22 Telp. (0370) 6163333 Fax. (0370) 6162999 Mataram – Nusa Tenggara Barat

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 01F/BARIDBMN/01/2017
DIPA BPK PUSAT**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Bulan Januari Tahun 2017**, bertempat di **Mataram**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Fahrudin
NIP : 198611172009011004
Jabatan : Staf Subbagian Umum dan TI

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : I.G.A. Masningrat
NIP : 196712301997032002
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode **Tahunan Tahun Anggaran 2016**, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	-



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Udayana No.22 Telp. (0370) 6163333 Fax. (0370) 6162999 Mataram – Nusa Tenggara Barat

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
3	Software	-	-	-
4	Lisensi	-	-	-
5	Akumulasi Amortisasi	-	-	-
D	TOTAL INTRAKOMPTABEL (A+B+C)	-	-	-
E	EKSTRAKOMPTABEL	-	-	-
F	TOTAL GABUNGAN (D+E)	-	-	-

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun Anggaran 2016, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Staf Subbagian Umum dan TI,

Kepala Subbagian Keuangan,

Fahrudin
NIP. 198611172009011004

I.G.A. Masningrat
NIP. 196712301997032002

Mengetahui,
Kepala Perwakilan

Wahyu Prayono
NIP. 197006011991031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KPKNL MATARAM
Jalan Pendidikan 24 Mataram

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD)
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : BAR-059/WKN.14/KNL.03/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh belas , bertempat di KOTA MATARAM, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Septsonno
NIP : 197409011995031003
Jabatan : Kasi PKN KPKNL Mataram

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KPKNL MATARAM untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Ida Bagus Ketut Wisnu
NIP : 196711291994031002
Jabatan : Pih. Kepala Perwakilan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara / Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Tahunan . Tahun Anggaran 2016, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2016		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan 1)	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
4	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya	0	0	0
6	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0

- 1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;
3) Rincian terlampir.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KPKNL MATARAM
Jalan Pendidikan 24 Mataram

- 2 -

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

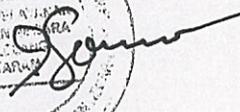
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun 2016, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PERWAKILAN
Ida Bagus Ketut Wisnu
NIP.196711291994031002

PIHAK PERTAMA,



Septonno
NIP.197409011995031003

*) pilih salah satu yang paling sesuai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KPKNL MATARAM
Jalan Pendidikan 24 Mataram

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD)
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
11	ASET LANCAR	0	0	0	0
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
16931	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
16932	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0	0

1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;

2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN

a. Pemutakhiran dan Mutasi Barang Milik Negara

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL Per 01-01-2016	MUTASI		SALDO AKHIR Per 31-12-2016
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
11	ASET LANCAR	0	0	0	0
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
16931	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
16932	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0	0

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;

2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari APBN

No	Nilai	Belanja Modal	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0	0	0

*) Nilai yang disajikan hanya dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran APBN dengan SPM/SP2D seperti Pembelian, Penyelesaian Pembangunan Langsung, Pengembangan Nilai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP

c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang BMN

i. Mutasi Tambah BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

ii. Mutasi Kurang BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
			0
TOTAL			

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
			0
TOTAL			

III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Jalan	0	0	0	0
5	Irigasi	0	0	0	0
6	Jaringan	0	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam Proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai Di Pengelola Barang (Dikembalikan)	0	0	0	0	0
5	Selesai Di Pengelola Barang (Ditolak)	0	0	0	0	0
6	Selesai Di Pengelola Barang (Disetujui)	0	0	0	0	0
7	Dalam Proses tindak lanjut pengguna/kuasa pengguna barang	0	0	0	0	0
8	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Tindak Lanjut Oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
10	Selesai Serah terima	0	0	0	0	0
11	Gagal/Batal Proses	0	0	0	0	0

IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

PNBP DARI SATKER

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

PNBP DARI APLIKASI SIMPONI

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

V. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN :

No	Uraian

b. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah :

No	Uraian

c. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN :

No	Uraian

d. Terdapat Perbedaan Nilai BMN antara BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dengan KPKNL yang disebabkan :

No	Uraian

PIHAK KEDUA,



Ida Bagus Ketut Wisnu

NIP.196711291994031002

PIHAK PERTAMA,



Septsonno

NIP.197409011995031003



LAMPIRAN 30
DAFTAR SSBP UNTUK PENYETORAN SISA UP TAHUN 2015
DAN
DAFTAR PENYETORAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2016
KE KAS NEGARA

DAFTAR SSBP UNTUK PENYETORAN SISA UP DAN PENYETORAN KAS LAIN SETARA KAS TA 2016

Kementerian/Lembaga : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BA 004)
Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT (01.890615)

No.	NTPN	Tanggal Dokumen	KPPN	Akun	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah						

Mataram, 13 Februari 2017
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002



LAMPIRAN 31
FOTOKOPI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2016

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2016	Tahun Anggaran 2016
---------------------------------	---	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (02) B. P. K. PUSAT
Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA MATARAM
Satuan Kerja : (890615) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Alamat dan Telp. : Jalan Udayana Nomor 22
No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-004.02.2.890615/2016
Tanggal Dokumen : 07-12-2015
Tahun Anggaran : 2016
KPPN : (038) MATARAM

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: K00447

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	75.238.237	1.345.608.473	1.420.846.710	0
	1. BP Kas (tunai dan bank)	3.527.487	1.345.608.473	1.349.135.960	0
	2. BP Uang Muka/Voucher	71.710.750	0	71.710.750	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	75.238.237	641.311.860	716.550.097	0
	1. BP UP *)	75.238.237	621.998.363	697.236.600	0
	2. BP LS-Bendahara	0	10.587.500	10.587.500	0
	3. BP Pajak	0	8.725.997	8.725.997	0
	4. BP Lain-lain	0	0	0	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0(+)
3. Jumlah kas	Rp.	0

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0(+)
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0(+)
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0(+)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. -- Tidak Ada --
2. -- Tidak Ada --

Telah diverifikasi tanggal 09 JAN 2017

KOTA MATARAM, 31-12-2016

Bendahara Pengeluaran,

Anita Noviana
NIP. 199011122010022001



*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
 BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 890615
 BULAN : DESEMBER 2016

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	0369530256	BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk	20	S-205/WPB.22/KP.0130/2015	21-01-2015	0

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya



Bendahara Pengeluaran,

Anita Noviana

NIP. 199011122010022001

LAPORAN SALDO REKENING
 BAKRI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 BULAN : DESEMBER 2016

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	0369530256	BPG 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	Bank Negara Indonesia (BNI) Peseo Tbk	20	S-205/WPB.22/KP.0 130/2015	21-01-2015	31-12-2016	0	

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Sabtu Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Enam Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: K00447

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0	
2. Saldo BP BPP	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0	
<u>4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)</u>	Rp.		0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0	
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0	
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0	
<u>5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)</u>	Rp.		0

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0	
<u>3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)</u>	Rp.		0

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0	
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0	
<u>3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)</u>	Rp.		0

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran



Anita Noviana

NIP. 199011122010022001

31-12-2016

Yang memeriksa

KPA atau PPK atas nama KPA



IGA Masningrat, S.H.

NIP. 196712301997032002

CERANG - MATARAM

SAL

REKENING : KRC IDR HIT BSB PEMERINTAH

PERIODE TGL : 01/12/2015

SD : 31/12/2016

NO. REKENING : 036930258

KERADA YTE : HD₂ CN SPM PERWAKILAN PROVINSI NTB

NPWP : 036930258011001

MATAUANG : IDR

II. UDAYANA NO 22

000000

KARANG BARU

0000

Jelaparang (Jelaparang)

TGL

TRANS

U R A I A N

DEBIT

KREDIT

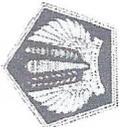
SALDO

SALDO AWAL

0,00

06 Dec	Cb.Penerimaan TRANSFER DARI	020998300000	610.000.000,00		
06 Dec	036930258 160361303000000-00000001	301300000000000000			
06 Dec	PEMBIDAIAN DARI 298474176 RPKBUNY				
06 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44323	100.000.000,00-		101.998.363,00	
06 Dec	ANITA NOVIANA/031907002303/TUP DESEREMBEH				
06 Dec	Cb.Penerimaan TRANSFER DAR	10.567.500,00	112.565.863,00		
06 Dec	036930258 160361303010100000001	301300010100000000			
06 Dec	PEMBIDAIAN DARI 298474176 RPKBUNY				
09 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44324	20.507.500,00-		121.998.363,00	
09 Dec	ANITA NOVIANA/031907002303/TUP DESEREMBEH				
15 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44325	20.000.000,00-		141.998.363,00	
15 Dec	ANITA NOVIANA/031907002303				
19 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44326	100.000.000,00-		241.998.363,00	
19 Dec	ANITA NOVIANA/031907002303/TUP 2016				
24 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44327	200.000.000,00-		441.998.363,00	
24 Dec	ANITA NOVIANA/031907002303				
25 Dec	C.Mataram TARIK CHQ CUB44328	101.998.363,00-	0,00		
25 Dec	TUP 2016 DIPA 03/ANITA NOVIANA/031907002303				
	AKHIR DARI REKENING				

06 JAN 2016



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 09-JAN-2017

KPPN : MATARAM
Kode Satker : 890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Ujang	Jumlah Setor	Keterangan
1		3010194605	01-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	04D6D1P5OS4BH6GP - 000000296530	411121	IDR	99.000,00	Ada
2		3010194605	05-DES-2016	KUBUS MEDIA ADVERTISAMA	06AC85I2DPOU28IP - 000000378881	411211	IDR	445.000,00	Ada
3		3010194605	14-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	08CA77TJV184Q3MP - 000000101686	411121	IDR	1.543.750,00	Ada
4		1010000244	19-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1ADFE0A97AUN8VOG - 928382036199	411121	IDR	910.000,00	Ada
5		3010194605	19-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1DEC56FB0TOH6O09 - 000000445035	411124	IDR	109.091,00	Ada
6		3010194605	01-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	4A43D1P43AG2PEGP - 000000291017	411121	IDR	99.000,00	Ada
7		3010194605	06-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	4EEB27C001D9JJB9 - 000000610076	411121	IDR	910.000,00	Ada
8		3010194605	14-DES-2016	KHU TONY	516FA7V0TS6TH1MP - 000000267673	411122	IDR	105.000,00	Ada
9		3010194605	14-DES-2016	KUBUS MEDIA ADVERTISAMA	5E732823EVMGV3MP - 000000171643	411122	IDR	66.750,00	Ada
10		1010000244	21-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	61A165FRI113VFKQG - 943838618757	411121	IDR	712.000,00	Ada
11		1010000244	05-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	69C862NTD84285IG - 959911309338	411121	IDR	270.000,00	Ada
12		1010000244	05-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	8E6DC2NSJB803KIG - 959818309249	411121	IDR	66.000,00	Ada
13		3010194605	14-DES-2016	KHU TONY	935737UUAHQ2IMP - 000000258955	411122	IDR	107.250,00	Ada
14		1010000244	19-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	98AE50J5U9FO1K9G - 905223067504	411121	IDR	910.000,00	Ada
15		3010194605	07-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	A72DE8R3FS9CJ53P - 000000305072	411121	IDR	135.000,00	Ada
16		3010194605	19-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	B2A026FABCIC6U09 - 000000433143	411124	IDR	56.818,00	Ada
17		1010000244	06-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	B48702TOE59KM3B0 - 900488329902	411121	IDR	910.000,00	Ada
18		1010000244	21-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	B70B948KQCG0ICQG - 902751480797	411121	IDR	475.000,00	Ada
19		1010000244	22-DES-2016	BENDAHARA PENGELUARAN	CF0D76EB1B4RHTJ0 -	411124	IDR	490.000,00	Ada



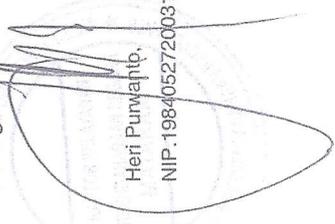
NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 09-JAN-2017

KPPN : MATARAM
Kode Satker : 890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN – NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Setor	Keterangan
20		1010000244	05-DES-2016	BPK RI P BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	906064726012 F076C2NT5V9FLKIG - 959865309313	411121	IDR	189.000,00	Ada
21		3010194605	14-DES-2016	KHU TONY	F3D0E7V3774OPTMP - 000000275544	411122	IDR	117.338,00	Ada

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara


Heri Purwanto,
NIP.198405272003121005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

DAFTAR ADK MPN YANG DIUPLOAD
TANGGAL UPLOAD: 09-JAN-2017 10:06:39

NO.	NAMA ADK MPN	STATUS UPLOAD
1	890615_adkkonfirmasi_1483925816.txt	Berhasil

Petugas Konversi,



4112637799

Danan J.A.W
NIP 198301312003121004

DATA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Satker 890615 BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KODE NTPN	KODE NTB	KODE AKUN	JUMLAH
1	F076C2NT5V9FLKIG	959865309313	411121	189.000
2	8E6DC2NSJB803KIG	959818309249	411121	66.000
3	A72DE8R3FS9CJ53P	000000305072	411121	135.000
4	4EEB27CO01D9JJB9	000000610076	411121	910.000
5	04D6D1P5OS4BH6GP	000000296530	411121	99.000
6	4A43D1P43AG2PEGP	000000291017	411121	99.000
7	69C862NTD84285IG	959911309338	411121	270.000
8	B48702TOE59KM3B0	900488329902	411121	910.000
9	516FA7V0TS6TH1MP	000000267673	411122	105.000
10	F3D0E7V3774OPTMP	000000275544	411122	117.338
11	935737UUHAQQ2IMP	000000258955	411122	107.250
12	08CA77TJVI84Q3MP	000000101686	411121	1.543.750
13	06AC85I2DPOU28IP	0000003788691	411211	445.000
14	5E732823EVMGV3MP	000000171643	411122	66.750
15	61A165FRI13VFKQG	943838618757	411121	712.000
16	B2A026FABCIQ6U09	000000433143	411124	56.818
17	1DEC56FB0TOH6009	000000445035	411124	109.091
18	98AE50J5U9FO1K9G	905223067504	411121	910.000
19	1ADFE0A97AUN8VOG	928382036199	411121	910.000
20	B70B948KQCG0ICQG	922751480797	411121	475.000
21	CF0D76EB1B4RHTJ0	906064726012	411124	490.000
	Jumlah Total			8.725.997

Bendahara Pengeluaran

Anita Noviana
199111122010022001



LAMPIRAN 32
DAFTAR ASET YANG BERASAL DARI BELANJA BARANG
TAHUN 2016



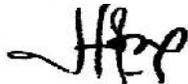
LAMPIRAN 33
DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI
TAHUN 2016

**DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT
PER 31 DESEMBER 2016**

No	SP2D					Pekerjaan/Kegiatan yang Tidak Dikapitalisasi	
	Nomor	Tanggal	Nilai	MAK	Uraian	Uraian	Nilai
	Jumlah		-			Jumlah	-

Keterangan Tambahan
1

Petugas SAKPA



(Augtalia Waryuningtyas)
NIP.198908242015022001

Petugas SIMAK-BMN



(Novita Sari Fitria W)
NIP.198811142015022001

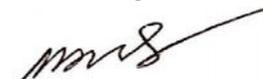
Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Keuangan



(I Gusti Ayu Masningrat)
NIP. 196712301997032002

Kepala Sub Bagian Umum



(Maula Rusindrawan)
NIP.197406131999031002



LAMPIRAN 34
LAMPIRAN PENDUKUNG CaLK

KERTAS KERJA PEMBELIAN PERSEDIAAN
Unit Pembantu Pengelola Persediaan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ESELON I (PUSAT
 Per 30 September 2016

No	No Faktur/Kuitansi	tanggal Faktur	No BAST	tanggal BAST	MAK	Nilai Faktur	Nilai Input	Selisih	Tanggal Buku	Data SAIBA	Selisih dengan SAIBA	No SP2D
1			04/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/01/2016	25/01/2016	521811	7.938.150	7.938.150	-	02/02/2016	23.092.300		160381303000868
2	inv/mtr409/1601/01	05/01/2016	bast/mtr409/1601/01	05/01/2016	521811	1.359.600	1.359.600	-	02/02/2016			160381303000868
3	inv/mtr01/1602/01	01/02/2016	07/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/02/2016	01/02/2016	521811	13.794.550	13.794.550	-	01/02/2016			160381303000868
4	CV. Master	08/03/2016	11/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/03/2016	08/03/2016	521811	680.200	680.200	-	08/03/2016	1.286.200		160381303001100
5			10/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/03/2016	04/03/2016	521811	606.000	606.000	-	04/03/2016			160381303001100
11			09/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/03/2016	02/03/2016	521811	696.000	696.000	-	02/03/2016	696.000		160381303001102
12	Toko Bahagia	18/04/2016	13/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/04/2016	18/04/2016	521811	325.000	325.000	-	18/04/2016	325.000		160381303002111
6	mu-sinv-1604-0002	26/04/2016	17/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/04/2016	26/04/2016	521811	13.200.180	13.200.180	-	16/04/2016	13.200.180		160381303002474
8	CV. Master	22/04/2016	21/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	12/05/2016	521811	890.900	890.900	-	01/06/2016	2.590.400		160381303003018
9	Pasific Stationary	02/05/2016	19/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	10/05/2016	521811	792.000	792.000	-	02/06/2016			160381303003018
10	CV. Master	15/04/2016	20/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	11/05/2016	521811	907.500	907.500	-	02/06/2016			160381303003018
7	Pasific Stationary	02/05/2016	18/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	09/05/2016	521811	978.000	978.000	-	01/06/2016	978.000		160381303003020
15	inv/mtr01/1605/03	31/05/2016	28/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/06/2016	01/06/2016	521811	1.364.366	1.364.366	-	08/06/2016	1.701.366		160381303003628
16	CV. Master	03/06/2016	29/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/06/2016	03/06/2016	521811	337.000	337.000	-	08/06/2016			160381303003628
13	inv/mtr01/1605/02	30/05/2016	26/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	31/05/2016	521811	1.355.186	1.355.186	-	08/06/2016	1.355.186		160381303003629
14	Toko Bahagia	30/05/2016	27/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	31/05/2016	521811	300.000	300.000	-	08/06/2016	300.000		160381303003631
17	inv/mtr01/1605/01	30/05/2016	25/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	31/05/2016	521811	4.115.700	4.115.700	-	08/06/2016	4.115.700		160381303003632
18	Toko Bahagia	31/05/2016	26a/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/05/2016	31/05/2016	521811	190.000	190.000	-	08/06/2016	333.000		160381303006337
19	Gramedia	09/06/2016	30/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/06/2016	09/06/2016	521811	143.000	143.000	-	09/06/2016			160381303006337
21	mu-sinv-1609-0001	08/09/2016	bast/mtr01/1609/01	08/09/2016	521811	4.969.000	4.969.000	-	08/09/2016	4.969.000		160381303007077
20	CV. Master	06/09/2016	37/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/09/2016	06/09/2016	521811	977.800	977.800	-	06/09/2016	9.392.200		160381303007080
22	CV. Master	08/09/2016	38/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/09/2016	08/09/2016	521811	439.400	439.400	-	08/09/2016			160381303007080
23	sinv-160914-0004	14/09/2016	bast/mtr409/1609/01	14/09/2016	521811	7.975.000	7.975.000	-	06/10/2016			160381303007080
24	CV. Master	06/10/2016	39/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/10/2016	06/10/2016	521811	90.000	90.000	-	16/10/2016	6.955.000		160381303007974
26	MU-SINV-1610-0001	20/10/2016	bast/mtr01/1610/01	20/10/2016	521811	6.865.000	6.865.000	-	20/10/2016			160381303007974
25	Gramedia	12/10/2016	40/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/10/2016	12/10/2016	521811	380.000	380.000	-	12/10/2016	380.000		160381303007975
29	1966/ZPS-INV/XI/16		42b/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	10/11/2016	521811	665.000	665.000	-	10/11/2016	10.760.000		160381701001133
30	1967/ZPS-INV/XI/16		43a/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	11/11/2016	521811	840.000	840.000	-	11/11/2016			160381701001133
31	1968/ZPS-INV/XI/16		43b/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	11/11/2016	521811	840.000	840.000	-	11/11/2016			160381701001133
CV. K्रेसi Utama 828		12/11/2016	45a/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	17/11/2016	521811	8.415.000	8.415.000	-	17/11/2016			160381701001133
27	CV. Master	07/09/2016	37a/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	07/09/2016	521811	760.000	760.000	-	20/11/2016	1.703.000		160381701001134
CV. Master		25/11/2016	54/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	25/11/2016	521811	943.000	943.000	-	25/11/2016			160381701001134
28	1969/ZPS-INV/XI/16		42a/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	10/11/2016	521811	840.000	840.000	-	10/11/2016	3.439.700		160381701001136
Gramedia		16/11/2016	46/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	17/11/2016	521811	432.100	432.100	-	17/11/2016			160381701001136
CV. Master		18/11/2016	48/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	18/11/2016	521811	948.100	948.100	-	18/11/2016			160381701001136
22	CV. Master	23/11/2016	52/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	23/11/2016	521811	912.000	912.000	-	23/11/2016			160381701001136
23	CV. Master	24/11/2016	53/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/11/2016	24/11/2016	521811	307.500	307.500	-	24/11/2016			160381701001136
1963/ZPS-INV/XI/16		19/11/2017	51/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	22/11/2017	521811	7.150.000	7.150.000	-	15/12/2016	7.150.000		160381701001844
24	Gramedia	05/12/2017	55/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	05/12/2016	521811	1.045.900	1.045.900	-	05/12/2016	18.193.300		160381701001845
CV. Master		07/12/2016	56/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	07/12/2016	521811	760.000	760.000	-	07/12/2016			160381701001845
CV. Master		09/12/2016	57/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	09/12/2016	521811	760.000	760.000	-	09/12/2016			160381701001845
CV. Master		13/12/2016	58/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	13/12/2016	521811	804.900	804.900	-	13/12/2016			160381701001845
1962/ZPS-INV/XI/16		19/11/2017	49/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	21/11/2017	521811	7.000.000	7.000.000	-	15/12/2016			160381701001845
1964/ZPS-INV/XI/16		19/11/2017	50/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	21/11/2017	521811	7.822.500	7.822.500	-	15/12/2016			160381701001845
CV. Master		14/12/2016	59/bast/humas-tu/xix.mtr.1.1/12/2016	14/12/2016	521811	159.500	159.500	-	14/12/2016	159.500		160381701001847
				45		113.075.032	113.075.032	-		113.075.032		

Petugas Pengelola Persediaan

 Novita Sari Fitri Wulandari
 NIP. 198811142015022001

Kepala Subbagian Umum

 Maula Rusindrawan
 NIP. 197406131999031002

